

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN SIKAP  
PARTISIPATIF TERHADAP KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT  
DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN AIR HANGAT  
KABUPATEN KERINCI

TESIS



oleh:

ISWAN PRAYOGA  
NIM. 16208008

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2018

## PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Judul : Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Sikap Partisipatif terhadap Keikutsertaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.

Nama : Iswan Prayoga

TM/NIM : 2016/16208008

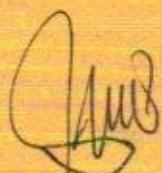
Program Studi (S2) : Ilmu Administrasi Negara (Magister Administrasi Publik)

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 09 Juli 2018

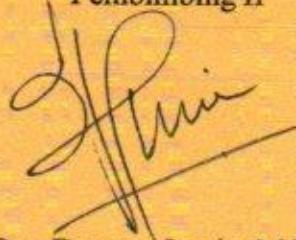
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D  
NIP. 19630401 198903 1 003

Pembimbing II



Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd., Ph.D  
NIP. 19570416 198602 1 001

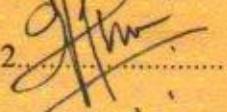
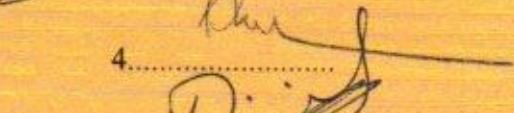
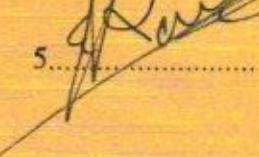
## LEMBARAN PENGESAHAN TESIS

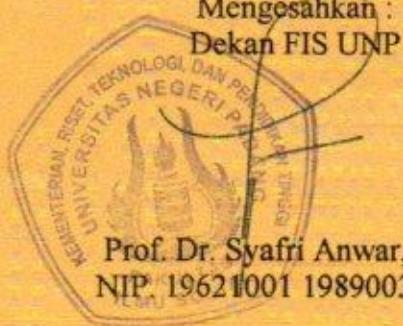
Nama : Iswan Prayoga  
TM/NIM : 2016/16208008  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara (S2)  
Judul Tesis : Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Sikap Partisipatif terhadap Keikutsertaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan sidang penguji Tesis Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang pada tanggal 27 Juli 2018 dan telah dinyatakan : **LULUS**

Padang, 27 Juli 2018

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D	1. 
Sekretaris	: Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd., Ph.D	2. 
Anggota	: Dr. Khairani, M.Pd	3. 
Anggota	: Dr. Helmi Hasan, M.Pd	4. 
Anggota	: Dr. Erianjoni, S.Sos., M.Si	5. 



## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul "**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN SIKAP PARTISIPATIF TERHADAP KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN AIR HANGAT KABUPATEN KERINCI**" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Juli 2018



yang menyatakan

ISWAN PRAYOGA

16208008

**THE EFFECT OF TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, AND  
PARTICIPATORY ATTITUDE TO WARD COMMUNITY  
PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF VILLAGES IN  
KECAMATAN AIR HANGAT OF KERINCI REGENCY**

By  
Iswan Prayoga  
e-mail : iswan.prayoga@yahoo.com

This study aimed to reveal the effect of transparency, accountability and participatory attitudes towards community participation in Kecamatan Air Hangat in Kerinci Regency. This research uses quantitative method. The population of this study is the entire community that existed in Kecamatan Air Hangat Kerinci Regency. The number of respondents in this study consisted of 389 peoples. Data collection in this study used multi-stage random sampling technique. Data were collected through questionnaires that had been tested the validity and reliability in advance both the content and empirical test items in the field. Data in this study was analyzed with path analysis. The results of this study have proved that there were the effects of transparency, accountability and participatory attitude toward community participation in Kecamatan Air Hangat in Kerinci Regency. This means that increased transparency, accountability and participatory attitudes would also increase community participation.

***Keywords: Transparency, Accountability, Participatory Attitudes and  
Community Participation.***

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN SIKAP  
PARTISIPATIF TERHADAP KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT  
DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN AIR HANGAT  
KABUPATEN KERINCI**

Oleh  
Iswan Prayoga  
e-mail : iswan.prayoga@yahoo.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan sikap partisipatif terhadap keikutsertaan masyarakat pada Kecamatan Air Hangat di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada pada Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. Responden dalam penelitian ini berjumlah 389 sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *multi stage random sampling*. Data dikumpulkan melalui angket yang telah di uji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu baik konten maupun uji empiris item di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah path analisis. Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh transparansi, akuntabilitas dan sikap partisipatif terhadap keikutsertaan masyarakat pada Kecamatan Air Hangat di Kabupaten Kerinci. Hal ini berarti semakin meningkat transparansi, akuntabilitas dan sikap partisipatif maka akan meningkat pula keikutsertaan masyarakat.

***Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Sikap Partisipatif dan Keikutsertaan Masyarakat.***

## KATA PENGANTAR



***Assalamu 'alaikum Wr. Wb***

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Sikap Partisipatif terhadap Keikutsertaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ayahanda, Ibunda tercinta dan istri tercinta, atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya yang telah menjadi motivator utama mendampingi penulis hingga penyelesaian tesis ini. Selain itu dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan Program Studi Magister Administrasi Publik .

2. Bapak Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D sebagai Pembimbing I dan Bapak Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd., Ph.D sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Erianjoni, S.Sos, M.Si dan Bapak Dr. Helmi Hasan, M.Pd dan Bapak Dr. Khairani, M.Pd sebagai tim penguji, yang telah banyak memberi masukan dan saran untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
4. Bapak Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd., Ph.D Ketua Prodi Program Magister Administrasi Publik (M.AP), dan Bapak Aldri Frinaldi, S.H, M.Hum., Ph.D. Sekretaris Program Studi Magister Administrasi Publik (M.A.P) Universitas Negeri Padang (UNP).
5. Bapak Camat Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci yang telah memberikan ijin kepada penulis dalam melakukan penelitian di desa-desa Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.
6. Para rekan mahasiswa Prodi S2 MAP FIS UNP, khususnya teman-teman angkatan V yang senantiasa memberikan motivasi dan masukan demi penyelesaian tesis ini.
7. Keluarga besar saya yang ada di Kerinci terutama yang selalu memberikan do'a dan semangat yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penelitian dan penyusunan tesis ini.

Penulis do'akan semoga Allah SWT membalas segala bantuan yang telah diberikan dan menjadi amal ibadah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan penulis berharap semoga sumbangan pemikiran yang penulis sampaikan bisa bermanfaat bagi pembaca semua khususnya untuk masyarakat dan pemerintah desa di Kabupaten Kerinci.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb ..*

Padang, Juli 2018

Penulis

**ISWAN PRAYOGA**  
NIM.16208008

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRACT BAHASA INGGRIS .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Batasan Masalah .....	14
D. Perumusan Masalah .....	15
E. Tujuan Penelitian .....	16
F. Manfaat Penelitian .....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	19
1. Keikutsertaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa .....	19
a. Konsep Keikutsertaan.....	19
b. Pembangunan Desa .....	35
c. Keikutsertaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa.....	36
d. Kendala dan Tantangan dalam Pembangunan Desa.....	38
2. Pengelolaan Keuangan Desa .....	39
a. Kebijakan Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Desa).....	39
b. Proses Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa.....	41
c. Pemerintahan Desa .....	47
3. Prinsip/azas Pengelolaan Keuangan Desa.....	49

a. Transparansi ( <i>Transparancy</i> ) .....	49
b. Akuntabilitas ( <i>Accountability</i> ).....	59
c. Sikap Partisipatif .....	71
d. Disiplin dan Tertib Anggaran.....	83
B. Penelitian Relevan .....	85
C. Kerangka Berpikir.....	96
D. Hipotesis .....	98

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Metode dan Desain Penelitian .....	99
B. Lokasi Penelitian.....	101
C. Populasi dan Sampel.....	101
1. Populasi .....	101
2. Sampel.....	102
D. Jenis dan Sumber Data.....	106
E. Teknik Pengumpulan Data.....	107
F. Definisi Operasional Variabel .....	108
1. Keikutsertaan Masyarakat (Y) .....	108
2. Transparansi (X1).....	109
3. Akuntabilitas (X2).....	109
4. Sikap Partisipatif (X3).....	109
G. Instrumen Penelitian .....	114
1. Uji Coba Angket .....	115
2. Uji Validitas .....	115
3. Uji Reliabilitas .....	119
H. Teknik Analisis Data .....	120
1. Analisa Deskriptif .....	121
2. Uji Prasyarat Analisis .....	122
a. Uji Normalitas .....	123
b. Uji Linearitas.....	123
c. Uji autokorelasi .....	124

d. Uji Heterokedastisitas.....	125
e. Pengujian Signifikansi Koefisien Regresi .....	125

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum .....	129
1. Gambaran Umum Kabupaten Kerinci .....	129
2. Geografis dan Demografi .....	132
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa.....	133
4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa .....	135
5. Profil Responden.....	135
B. Temuan Khusus .....	136
1. Deskripsi Variabel Penelitian .....	136
2. Pengujian Persyaratan Analisis Data .....	142
C. Pengujian Hipotesis .....	154
1. Pengajuan Model Konseptual .....	154
2. Model Analisis Jalur .....	155
3. Mengoperasikan Model Analisis Dengan Komputer .....	157
4. Merangkum Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung .....	159
5. Uji Substruktur Mediator ( <i>sobel test</i> ).....	161
6. Signifikansi Pengaruh .....	167
D. Pembahasan .....	171
1. Pengaruh langsung transparansi terhadap sikap partisipatif .....	171
2. Pengaruh langsung akuntabilitas terhadap sikap partisipatif .....	173
3. Pengaruh langsung transparansi terhadap keikutsertaan Masyarakat .....	176
4. Pengaruh langsung akuntabilitas terhadap keikutsertaan masyarakat .....	179
5. Pengaruh langsung sikap partisipatif terhadap keikutsertaan masyarakat .....	181
6. Pengaruh tidak langsung transparansi terhadap keikutsertaan masyarakat melalui sikap partisipatif.....	183

7. Pengaruh Tidak Langsung Akuntabilitas terhadap Keikutsertaan Masyarakat melalui Sikap Partisipatif .....	185
E. Keterbatasan Penelitian.....	187

## **BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	188
B. Implikasi .....	190
1. Implikasi Tioritis .....	190
2. Implikasi Praktis.....	192
C. Saran .....	193

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Jumlah Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Air Hangat .....	8
1.2 Daftar Nama Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Koto Majidin Diair .....	12
2.1 Model-model Keikutsertaan .....	21
2.2 Ringkasan Literatur tentang Keikutsertaan Masyarakat.....	33
2.3 Indikator Keikutsertaan Masyarakat.....	38
2.4 Ringkasan Literatur tentang Transparansi .....	56
2.5 Indikator Transparansi.....	59
2.6 Ringkasan Literatur tentang Akuntabilitas .....	68
2.7 Indikator Akuntabilitas .....	71
2.8 Ringkasan Literatur tentang Sikap Partisipatif .....	80
2.9 Indikator Sikap Partisipatif.....	83
2.10 Peran dan keterlibatan masyarakat .....	84
3.1 Jumlah penduduk masing-masing desa di Kecamatan Air Hangat berdasarkan jenis pekerjaan .....	102
3.2 Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan .....	105
3.3 Persentase jumlah penduduk dan distribusi sampel penelitian.....	105
3.4 Indikator Penelitian dan Kisi-Kisi Kuisioner Penelitian .....	110
3.5 Pengukuran Variabel .....	115
3.6 Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi.....	116
3.7 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas .....	117
3.8 Hasil Uji Validitas Variabel Sikap Partisipatif.....	118
3.9 Hasil Uji Validitas Variabel Keikutsertaan Masyarakat.....	119
4.1 Jumlah Desa Berdasarkan Kecamatan Kabupaten kerinci .....	131
4.2 Jenis Kelamin Responden.....	135
4.3 Pekerjaan Responden.....	136
4.4 Deskripsi Indikator Variabel Keikutsertaan .....	136
4.5 Deskripsi Indikator Variabel Transparansi .....	138
4.6 Deskripsi Indikator Variabel Akuntabilitas .....	140

4.7	Deskripsi Indikator Variabel Sikap Partisipatif.....	141
4.8	Rangkuman Analisis Uji Normalitas .....	144
4.9	Analisis Varians Linearitas Transparansi (X1) terhadap Sikap Partisipatif (X <sub>3</sub> ) .....	145
4.10	Analisis Varians Linearitas Akuntabilitas (X <sub>2</sub> ) terhadap Sikap Partisipatif (X <sub>3</sub> ).....	146
4.11	Analisis Varians Linearitas bentuk regresi Transparansi (X <sub>1</sub> ) terhadap Keikutsertaan (Y).....	147
4.12	Analisis Varians Linearitas Akuntabilitas (X <sub>2</sub> ) terhadap Keikutsertaan (Y).....	147
4.13	Analisis Varians Linearitas Sikap Pertisipatif (X <sub>3</sub> ) terhadap Semangat Keikutsertaan (Y).....	148
4.14	Rangkuman Uji Linearitas.....	149
4.15	Durbin-Watson Klasifikasi Nilai d Uji Durbin-Watson .....	150
4.16	Hasil Uji Autokorelasi .....	151
4.17	Hasil Uji Heterokedastisitas .....	152
4.18	Analisis Varian Regresi Sub Struktur 1 Pengaruh Transparansi (X <sub>1</sub> ), Akuntabilitas (X <sub>2</sub> ) terhadap Sikap Partisipatif (X <sub>3</sub> ) .....	152
4.19	Analisis Varians Regresi Substruktur 2 Pengaruh Transparansi (X <sub>1</sub> ), Akuntabilitas (X <sub>2</sub> ), Sikap Partisipatif (X <sub>3</sub> ) terhadap Keikutsertaan (Y).....	153
4.20	Rangkuman Hasil Uji F .....	134
4.21	Analisis Mediator Transparansi.....	162
4.22	Analisis Mediator Akuntabilitas .....	165
4.23	Ringkasan analisis Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel Eksogen terhadap Variabel Endogen.....	168

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Struktur Dasar Kewenangan Pemerintah.....	48
2.2 Hubungan Antar Variabel Penelitian.....	99
3.1 Model Analisis Jalur.....	100
3.2 Sub Strukur Jalur 1.....	100
3.3 Sub Struktur Jalur 2.....	140
4.1 Peta Wilayah Kabupaten Kerinci.....	147
4.2 Bagan Pemerintahan Desa.....	135
4.3 Model analisis jalur tentang Pengaruh Variabel transparansi ( $X_1$ ), akuntabilitas ( $X_2$ ), dan sikap partisipatif ( $X_3$ ) terhadap keikutsertaan (Y)...	156
4.4 Sub struktur jalur 1.....	156
4.5 Sub struktur jalur 2.....	156
4.6 Substruktur Jalur 1.....	158
4.7 Substruktur Jalur 2.....	159
4.8 Model Mediator Transparansi.....	162
4.9 Model Mediator Akuntabilitas.....	165
4.10 Model Analisis dengan Nilai Koefisien Jalur.....	168

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Indikator Penelitian Dan Kisi-Kisi Kuisoner Penelitian.....	201
2. Angket Penelitian.....	205

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah ditetapkan oleh MPR dengan mengeluarkan ketetapan yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah: pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta berimbang keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.

Namun sejalananya waktu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti, sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang penggantian yaitu: UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 memberi maksud untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Pengertian otonomi daerah di atas, sejalan dengan pendapat di atas, Abdul Halim dan Muhammad Iqbal (2012:115) menyatakan bahwa desentralisasi merupakan jawaban atas tuntutan baik di tingkat bawah (masyarakat lokal) maupun elit politik baik di tingkat pusat dan daerah, memaksa daerah agar dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan masyarakat dengan segenap keterbatasan sumber daya yang dimiliki agar mampu membiayai pembangunan daerahnya.

Selanjutnya Abdul Halim dan Muhammmad Iqbal (2012:115) juga mengatakan bahwa pemerintah daerah menyadari akan tanggung jawab yang dibebankan oleh undang-undang untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah dalam upayanya berkewajiban merumuskannya ke dalam suatu wujud: misi, visi, dan tujuan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk perencanaan maupun penganggarannya.

Konsep desentralisasi dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menunjukkan tiga pola otonomi. (1) Otonomi

provinsi sebagai otonomi terbatas; (2) Otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas; (3) Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Ditambahkan oleh Sumpeno (2011:25) bahwa otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa.

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 dinyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam suatu lingkungan organisasi pemerintahan, baik itu yang berada di atas (pemerintah pusat) maupun yang berada di bawah (pemerintah desa), semua di bentuk karena mempunyai suatu tujuan tertentu, untuk mencapai tujuan tersebut setiap organisasi pemerintahan tidak bisa terlepas dari sumber daya manusia yang dimiliki organisasi tersebut. Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dan strategis untuk tercapainya tujuan organisasi di lingkungan pemerintahan, hal ini di karenakan manusia menjadi

perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi tersebut meskipun sarana prasarana dan sumber daya lainnya mencukupi. Oleh sebab itu agar pelaksanaan tugas organisasi di lingkungan pemerintahan dapat berjalan efektif, efisien dan optimal dituntut pengembangan sumber daya manusia yang terencana dan berkelanjutan sehingga akan mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten, profesional serta mampu mempunyai mutu kinerja yang tinggi yang sesuai dengan tuntutan organisasi serta di harapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat lainnya, hal lain yang sangat penting diperhatikan adalah bagaimana para aparatur desa dalam mengelola dan melaksanakan pembangunan desa dana desa dengan baik.

Yusuf Murtiono (2016:13) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa tidak sekedar menunjukkan adanya alokasi anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga pemerintah desa/kepala desa harus mengedapankan asas tata kelola keuangan desa dengan baik yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah desa/kepala harus selalu mengedepankan asas atau prinsip-prinsip dalam proses pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa yaitu: (1) transparan (2) akuntabel (3) partisipatif, serta (4) tertib dan disiplin anggaran. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Soleh Rohmansyah (2015:7) yang menyatakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa/ kepala desa harus selalu berpedoman pada asas atau prinsip-prinsip pengeleolaan keuangan desa, salah satunya adalah (1) akuntabilitas (2)

keterbukaan, (3) ketertiban dan ketaatan, serta (4) bermanfaat untuk masyarakat. Oleh sebab itu kepala desa diharapkan selalu melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan keuangan desa dengan berpedoman pada asas atau prinsip pengelolaan keuangan desa agar kinerja kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa dapat terwujud sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan setelah peneliti melakukan observasi awal ternyata masih banyak desa yang belum mengedepankan asas atau prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan desa yaitu: transparan, akuntabel, sikap partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 tahun 2016, bab II pasal 3 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dinyatakan bahwa tujuan peraturan Bupati ini agar tertib administrasi, transparan, akuntabel, dan berkualitas dalam pelaksanaan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Ini artinya untuk pengelolaan dana desa harus dilandasi oleh azas-azas yang berlaku seperti yang tertera di atas.

Sejalan dengan penjelasan di atas, peneliti juga mewawancarai salah satu tokoh masyarakat Desa Koto Majidin Di Air (Adiarman 52 tahun pada tanggal 15 Januari 2018) beliau mengatakan bahwa di Desa Koto Majidin Di Air pengelolaan keuangan Desa belum maksimal dalam mengedepankan asas-asas pengelolaan keuangan Desa yaitu : transparan, akuntabel, sikap partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran, akibatnya masih banyak masyarakat merasa

tidak puas terhadap kinerja kepala desa dan pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa.

Saat ini terdapat kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terhadap keterbatasan keuangan desa yaitu APBDes yang tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Hal tersebut disebabkan oleh empat faktor utama (Hudayana, 2005:2) dalam makalahnya yang berjudul peluang pengembangan partisipasi masyarakat melalui kebijakan dana desa, pengalaman enam kabupaten. Pertama, desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai pendapatan asli desa (PADES) yang tinggi. Ketiga, Masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Berdasarkan keempat faktor tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan adanya suatu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes.

Keuangan desa yang kurang transparan oleh aparat desa juga menjadi salah satu kendala dalam melihat prioritas pembangunan desa yang diselenggarakan. Pertanggungjawaban kepala desa tidak pernah disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepada masyarakat secara terbuka. Seharusnya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh kepala desa disampaikan pada forum musyawarah pembangunan desa

(Musrenbangdes) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa tentu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa memiliki prinsip-prinsip atau asas-asas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Seharusnya pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Air Hangat juga menerapkan prinsip-prinsip yang demikian, akan tetapi karena ketidaktahuan sebagian besar aparatur dan masyarakat menyebabkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Sejalan dengan di atas, pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*). Komponen pertama adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka,

kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jambi yang terdiri dari 16 Kecamatan, Kecamatan Air Hangat adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kerinci. Kecamatan Air Hangat terdiri dari 16 Desa. Adapun jumlah penduduk berdasarkan Desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Air Hangat**

No	Desa	Jumlah Penduduk
1	Air Tenang	1.092 Orang
2	Balai	653 Orang
3	Baru Semurup	769 Orang
4	Koto Diair	587 Orang
5	Koto Dua/Duo Lamo	848 Orang
6	Koto Majidin Di Air	904 Orang
7	Koto Majidi Hilir	959 Orang
8	Koto Majidin Mudik	855 Orang
9	Muara Semerah	893 Orang
10	Muara Semerah Mudik	1.141 Orang
11	Pasar Semurup	477 Orang
12	Pendung Hilir	1.066 Orang
13	Pendung Mudik	868 Orang
14	Pendung Tengah	829 Orang
15	Sawahan Jaya	967 Orang
16	Sawahan Koto Majidin	920 Orang
	<b>TOTAL</b>	<b>14.389 Orang</b>

*Sumber: BPMPDPP-KB Kabupaten Kerinci 2016*

Berdasarkan data awal yang peneliti dapatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa yang ada di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci pada saat ini dirasa masih kurang optimal, Hal ini dibuktikan dengan bukti bahwa masih banyak terdapat masyarakat desa yang tidak ikut serta dan juga acuh terhadap pembangunan desa. Berdasarkan pengamatan peneliti dan pengakuan dari salah seorang tokoh adat di Desa Sawahan Koto Majidin (Amrudinal 59 tahun pada tanggal 26 September 2017), beliau menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak ikut serta mulai dari perencanaan sampai dengan pembangunan desa. Apabila dihubungkan gambaran kinerja kepala desa dengan yang ada dilapangan, hal ini disebabkan masih ditemui sebagian kepala desa yang belum maksimal mengelola keuangan desa yang seharusnya dikelola berdasarkan pada asas-asas pengelolaan keuangan desa yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga untuk dapat mencapai kinerja yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan desa tidak dapat dicapai optimal. Salah satunya adalah kurang transparan, akuntabel dan sikap partisipatifnya kepala desa dalam mengelola keuangan desa agar masyarakat ikut serta dalam pembangunan desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya peneliti juga mewawancara salah seorang tokoh masyarakat yang berasal dari Desa Koto Majidin Di Air bernama Karya (46 tahun) pada tanggal 28 September 2017 pukul 15.00 WIB, beliau juga menyatakan bahwa kurang optimalnya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci, terlihat pada saat proses pembangunan desa masih banyak anggota masyarakat yang tidak peduli.

Menurutnya penyebab dari masyarakat tidak peduli dan tidak ingin ikut serta dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya transparansi dirasakan oleh masyarakat dari apratur desa.

Kemudian peneliti juga melakukan observasi awal di Desa Sawahan Jaya Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci, di lokasi penelitian peneliti mendapatkan data berdasarkan pengamatan bahwa masyarakatnya juga tidak banyak yang ikut serta dalam pembangunan desa, yang ikut serta pada saat kegiatan pembangunan hanyalah tukang yang telah dirunjuk oleh kepala desa dan juga peneliti melihat tidak ada masyarakat yang melihat pada saat proses pembangunan desa.

Yusuf Murtiono (2016:13) menyatakan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa membutuhkan adanya transparansi, akuntabilitas, partisipatif, disiplin dan tertib anggaran namun yang terjadi di lapangan bahwa masih kurang optimalnya aparatur desa dalam menerapkan keempat asas-asas sehingga terjadi hal-hal seperti yang peneliti temui di lokasi penelitian pada saat observasi awal.

Dari pengamatan awal peneliti di lapangan, peneliti melihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa yaitu transparansi, akuntabilitas, dan sikap partisipatif. Transparansi adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dana desa. Berdasarkan observasi yang peneliti laksanakan transparansi yang dari kepala desa pada masyarakat desa di kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci masih

belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini diperkuat dengan pengamatan peneliti di lapangan bahwa perangkat desa dan kepala desa tidak transparan dalam pengelolaan dana desa sehingga mengakibatkan masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengelolaan dana desa dan akhirnya menyebabkan masyarakat tidak ingin ikut serta dalam pembangunan desa.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan kepuasan kerja kepala desa masih kurang dirasakan hal ini bisa dilihat dari masih kurang intensifnya kepala desa berada di kantor dan masih kurang komitmennya kepala desa dalam melaksanakan pekerjaanya. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak belum maksimalnya akuntabilitas.

Kemudian, faktor terakhir yang dianggap mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa adalah sikap partisipatif. Sikap Partisipatif ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam hal ini sikap partisipatif yang maksud adalah dalam hal musyawarah desa untuk penganggaran, perencanaan dan pengelolaan dana desa. Keikutsertaan masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Salah satu desa di Kecamatan Air Hangat masih ada yang tidak mengajak masyarakat untuk ikut

serta dalam musyawarah pengelolaan dana desa sehingga transparansi di desa-desa yang ada di Kecamatan Air Hangat belum maksimal.

Pada saat observasi awal di salah satu desa yang ada di Kecamatan air Hangat yaitu desa Koto Majidin Diair peneliti mendapatkan sebuah data statistik kehadiran masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di desa Koto Majidin Diair.

**Tabel 1.2**  
**Daftar Nama Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Koto Majidin Diair**

No	Nama Kegiatan	Jumlah Kehadiran Seharusnya	Jumlah Kehadiran Masyarakat
1	Gotong royong pembangunan kantor desa Koto Majidin Diair	Seluruh masyarakat desa Koto Majidin Diair	56 Orang
2	Pembangunan jalan menuju ke lahan pertanian	Seluruh masyarakat desa Koto Majidin Diair	75 Orang
3	Gotong royong membersihkan irigasi atau aliran air menuju ke lahan pertanian warga (sawah)	Seluruh masyarakat desa Koto Majidin Diair	49 Orang
4	Pelatihan narkoba dan kesehatan	Seluruh pemuda dan pemudi masyarakat desa Koto Majidin Diair	15 Orang
5	Pelatihan BUMDES	Seluruh anggota BUMDES Koto Majidin Diair	7 Orang

*Sumber: Kantor Desa Koto Majidin Diair*

Berdasarkan tabel di atas dan beberapa fenomena-fenomena yang peneliti uraikan di atas terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak ingin berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas dan sikap partisipatif terhadap

keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa, melalui penelitian tesis ini yang berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan sikap Partisipatif terhadap Keikutsertaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat identifikasi masalah yaitu:

1. Tingkat keikutsertaan masyarakat meliputi perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan program pembangunan desa belum optimal.
2. Kurangnya arahan, informasi, pemdekatan, kerjasama dan bimbingan pemerintahan desa terhadap masyarakat mengakibatkan kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Pengelolaan dana desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci tidak transparan sehingga mengakibatkan kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Tidak adanya tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sehingga mengakibatkan kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.
5. Tidak adanya sikap proaktif pemerintahan desa kepada masyarakat sehingga mengakibatkan kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

6. Kurangnya respon pemerintah desa dan musyawarah antara masyarakat dengan pemerintah desa sehingga mengakibatkan kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Pengelolaan dana desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci tidak akuntabel dan tidak partisipatif sehingga mengakibatkan kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.
8. Prioritas pembangunan desa yang diselenggarakan di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci tidak sesuai dengan keinginan masyarakat

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka ruang lingkup kajian penelitian ini dibatasi pada faktor *endogen* yaitu keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan air hangat Kabupaten Kerinci, faktor penyebab (*eksogen*) adalah pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan sikap partisipatif di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. Eli Solihat (2009), transparansi dan akuntabilitas, baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara parsial, mempunyai pengaruh positif terhadap partisipasi.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tetang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

1. Perencanaan,
2. Pelaksanaan,

3. Penatausahaan,
4. Pelaporan, dan
5. Petanggungjawaban keuangan.

Disamping itu peran pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu pembangunan. Berdasarkan uraian di atas, maka dianggap perlu dilakukan penelitian secara empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keikusertaan masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci antara lain adalah: pengaruh transparansi, pengaruh akuntabilitas, dan pengaruh sikap partisipatif. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap sikap partisipatif dalam pembangunan desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten kerinci.
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap sikap partisipatif dalam pembangunan desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap Keikusertaan masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.

4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap Keikusertaan masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.
5. Apakah sikap partisipatif berpengaruh terhadap keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.
6. Apakah transparansi berpengaruh terhadap keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa melalui sikap partisipatif di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.
7. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa melalui sikap partisipatif di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Manganalisis pengaruh transparansi terhadap sikap partisipatif dalam pembangunan desa di Kecamatan Air hangat Kabupaten kerinci.
2. Manganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap sikap patisipatif dalam pembangunan desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.
3. Manganalisis pengaruh transparansi terhadap keikusertaan masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.

4. Manganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap keikusertaan masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.
5. Manganalisis pengaruh sikap partisipatif terhadap keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.
6. Manganalisis pengaruh transparansi terhadap keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa melalui sikap partisipatif di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.
7. Manganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa melalui sikap partisipatif di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis; Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori dalam ilmu manajemen keuangan daerah.
  - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pemerintahan dan administrasi. Lebih khususnya lagi terkait dengan pengelolaan dana desa dan pelaksanaannya dalam masyarakat.
2. Manfaat Praktis; Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat memberi manfaat bagi pemerintah Kabupaten Kerinci, pemerintah desa dan seluruh stakeholders di dalam upaya mendorong meningkatnya penataan dan pengelolaan keuangan desa dalam rangka perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.
- b. Penelitian ini bermanfaat sebagai upaya ilmiah dalam mengakaji dan meneliti dana desa agar implementasinya berjalan sesuai dengan peraturannya, sehingga menghasilkan catatan atau dokumentasi yang menjadi bahan peinformasi tertulis tentang dana desa.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan sebagai bahan bacaan agar lebih mengetahui tentang pengelolaan dana desa.
- d. Sebagai salah satu tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan, serta sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan S2 guna mendapatkan gelar Magister Administrasi publik (MAP) di Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang (UNP).
- e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi untuk memberikan penjelasan tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan sikap partisipatif, terhadap keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan sikap partisipatif terhadap keikusertaan masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. Dari hasil pengolahan data dan pembahasan seperti yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Terdapat pengaruh transparansi terhadap sikap partisipatif secara signifikan, di mana nilai kontribusi didapatkan adalah 0,019881 atau 2,0% dengan nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  artinya transparansi sangat berpengaruh terhadap sikap partisipatif pemerintah desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci dan transparansi perlu ditingkatkan lagi demi meningkatkan sikap partisipatif selanjutnya.
2. Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap sikap partisipatif secara signifikan, di mana nilai kontribusi didapatkan adalah 0,038416 atau 3,8% dengan nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  artinya akuntabilitas sangat berpengaruh terhadap sikap partisipatif dan akuntabilitas perlu ditingkatkan lagi demi meningkatkan sikap partisipatif pemerintah desa untuk selanjutnya.
3. Terdapat pengaruh transparansi terhadap keikusertaan masyarakat secara signifikan, di mana nilai kontribusi didapatkan adalah 0,011236 atau 1,1 %

dengan nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  artinya transparansi sangat berpengaruh terhadap keikutsertaan dan transparansi perlu ditingkatkan lagi demi meningkatkan keikutsertaan masyarakat untuk selanjutnya.

4. Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap keikutsertaan secara signifikan, di mana nilai kontribusi didapatkan adalah 0,010404 atau 1,2% dengan nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  artinya akuntabilitas sangat berpengaruh terhadap keikutsertaan dan akuntabilitas perlu ditingkatkan lagi demi meningkatkan keikutsertaan masyarakat untuk selanjutnya.
5. Terdapat pengaruh sikap partisipatif terhadap keikutsertaan secara signifikan, di mana nilai kontribusi didapatkan adalah 0,014884 atau 1,4% dengan signifikansi lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  artinya sikap partisipatif sangat berpengaruh terhadap keikutsertaan dan sikap partisipatif perlu ditingkatkan lagi demi meningkatkan keikutsertaan masyarakat untuk selanjutnya.
6. Terdapat pengaruh transparansi terhadap keikutsertaan melalui sikap partisipatif pemeritah desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci dengan kontribusinya sebesar 0,6%, yang artinya selain memiliki pengaruh langsung antara transparansi terhadap keikutsertaan masyarakat, keikutsertaan masyarakat juga dipengaruhi oleh pengaruh tidak langsung transparansi melalui sikap partisipatif.
7. Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap keikutsertaan melalui sikap partisipatif pemerintah desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci dengan kontribusinya sebesar 3,8%, yang artinya selain memiliki pengaruh langsung antara akuntabilitas terhadap keikutsertaan masyarakat,

keikutsertaan masyarakat juga dipengaruhi oleh pengaruh tidak langsung akuntabilitas melalui sikap partisipatif pemerintah desa.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian ini maka dapat dikemukakan implikasi teoritis maupun implikasi praktis dari penelitian ini

### 1. Implikasi teoritis

Implikasi secara teoritis berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa untuk mewujudkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa, maka sudah seharusnya pemerintah desa dalam bekerja penuh dengan rasa tanggung jawab

Keikutsertaan masyarakat merupakan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, keikutsertaan merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau keikutsertaan tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Dengan demikian, setiap instansi pemerintah akan berusaha seoptimal mungkin mengupayakan produktivitas kerja para pegawai agar dapat lebih ditingkatkan. Partisipasi juga berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan.

Mewujudkan keikutsertaan aktif masyarakat dalam pembangunan desa dapat dilakukan dengan cara meningkatkan transparansi antar sesama pegawai dan masyarakat yaitu dengan cara selalu mengadakan acara silaturrahmi dan acara-acara lainnya sehingga antara pemerintah desa dan masyarakat saling terbuka. Meningkatkan akuntabilitas seperti memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja suatu organisasi pemerintahan desa, seperti dengan menunjukkan kejujuran, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas sehingga merangsang keikutsertaan masyarakat dan juga dengan meningkatkan sikap partisipatif pemerintah desa seperti dengan memberikan tempat ruang kontrol antara pemerintah desa dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan

Selain itu untuk mewujudkan keikutsertaan masyarakat Ndraha (1990:104) cara meningkatkan semangat kerja antara lain :

1. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata
2. Dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsiendorong timbulnya jawaban yang dikehendaki
3. Dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku yang dikehendaki secara berlanjut

Selain hal di atas Bryant dan White (dalam Ndraha 1990:105) juga menyebutkan cara lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu:

1. Proyek pembangunan desa yang diransang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat
  2. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
  3. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan
2. Implikasi Praktis

Berdasarkan Uji hipotesis penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa untuk dapat meningkatkan keikutsertaan masyarakat, diharapkan Dinas Pemerintah Desa khususnya kepala desa dan perangkat desa memperhatikan rangsangan keikutsertaan masyarakat, sehingga masyarakat dengan giat dan bersemangat dalam berkerja. Dan diharapkan dapat memperhatikan transparansi, akuntabilitas dan sikap partisipatif dengan serius hal dikarenakan bahwa secara teori maupun uji hipotesis keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan air Hangat Kabupaten Kerinci dipengaruhi oleh transparansi, akuntabilitas dan sikap partisipatif. Oleh karena itu salah satu usaha untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa, diharapkan meningkatkan transparansi antara pemerintah desa dan masyarakat dengan cara memberikan segala informasi dengan terbuka dan transparan, Kejelasan Informasi, dan juga Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Selain itu salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa adalah diharapkan selalu memperhatikan akuntabilitas salah satu usaha yang dapat di lakukan

adalah memberi warga sarana untuk memahami apa keputusan yang dibuat dan apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah desa, seperti menunjukkan tingkat pencapaian tujuan telah ditetapkan, jujur, objektif dan inovatif. Hal ini mengingat tugas yang diemban pemerintah desa yang cukup berat salah satunya memberikan pelayanan penuh waktu kepada masyarakat, sudah sepantasnya menunjukkan akuntabilitas yang tinggi.

Selain itu berdasarkan hasil uji hipotesis sikap partisipatif juga dapat mempengaruhi keikutsertaan masyarakat, oleh karena itu salah satu usaha yang dapat meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa dalam berkerja dengan memberikan dorongan dalam berkerja. Sikap partisipatif dapat diukur dari bagaimana pemerintah desa memberikan tempat untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya, pemerintah menunjukkan sikap proaktifnya untuk mendorong partisipasi warga, dan juga bagaimana sistem pemerintah desa menyampaikan anggaran kepada publik. Demi tercapainya pembangunan desa yang maksimal sesuai dengan yang telah direncanakan dan melibatkan warga di setiap prosesnya. Menurut Davis (dalam Ndraha, 1987:37), pengertian sikap partisipatif adalah sebagai suatu dorongan mental dan emosional yang menggerakkan mereka (masyarakat) untuk bersama-sama mencapai tujuan dan bersama-sama bertanggung jawab.

### **c. Saran**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, maka peneliti memiliki beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, antara lain:

- 1.** Untuk menghasilkan sikap partisipatif yang tinggi serta keikutsertaan masyarakat yang baik, maka pemerintah desa di kecamatan air hangat Daerah Kabupaten Kerinci hendaknya memperhatikan transparansi dan akuntabilitas karena secara teori maupun hasil uji hipotesis yang peneliti lakukan terbukti dapat mempengaruhi sikap partisipatif dan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.
- 2.** Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang berkenaan dengan generalisasi teori dengan menambah responden yang lebih banyak jumlahnya, serta dapat meneliti faktor-faktor lain seperti kinerja, gaya kepemimpinan, tingkat pendidikan, latar belakang, iklim kerja, budaya kerja yang dapat berpengaruh terhadap keikutsertaan masyarakat yang belum peneliti teliti dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto, R. 1975. *Pengantar Geografi Pembangunan*. Yogyakarta: PT. Kedaulatan Rakyat.
- BPS Kabupaten Kerinci. 2016. *Kerinci dalam Angka 2016, Kerinci Regensi in Figures 2016*. Kerinci: BPS Kabupaten Kerinci.
- Burhan, Bungin. 2013 *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2010. *Applikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. dan Iqbal, Muhammad. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD, 2005, “*Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten*”, Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.
- Jefta, Leibo. 1990. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Jonathan, Sarwono. 2011. *Mixed Methods : Cara Mengabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Semarang: Clyapps Diponegoro University.
- Murtiono, Yusuf. 2016. *Modul Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Infest.
- Nazir, M. 2013. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nyoman Syuida, I. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta.
- Poltak Sinambela, Lijan. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta. Bumi Aksara.